



YOGYAKARTA

► LEGALITAS PRODUK

UMKM Didorong Urus Sertifikat Halal

Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM (Disperinkop UKM) Kota Jogja mendorong pelaku UMKM segera mengurus sertifikasi halal. Imbauan ini utamanya ditujukan bagi pemilik usaha makanan dan minuman.

Kepala Disperinkop UKM, Tri Karyadi Riyanto Raharjo menuturkan sertifikasi halal sebaiknya diurus sebelum Oktober 2024. "Oktober 2024 ini produk makanan yang beredar di Indonesia apalagi Kota Jogja harus sudah bersertifikasi halal," ujar Totok, sapaan akrab Tri Karyadi, Rabu (24/4).

Totok mengatakan aturan ini dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan. Tak hanya UMKM di bidang makanan dan minuman yang didorong untuk punya sertifikasi halal. Produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan, serta bahan baku, dan bahan tambahan pangan wajib mengantongi sertifikat halal. Untuk itu, saat ini Disperinkop UKM Kota Jogja mengencankan edukasi. Sebab, pelaku UMKM masih cenderung abai, mengingat Oktober 2024 terhitung masih enam bulan lagi. Nantinya ada sejumlah prosedur jika pada Oktober 2024 pelaku UMKM belum tersertifikasi halal.

"Sebelumnya kami sudah menggelar edukasi. Nanti pastinya ada semacam sanksi administrasi. Tugas kami mengedukasi UMKM harus bersertifikasi," tuturnya.

Tak hanya mengencankan edukasi, Disperinkop UKM Kota Jogja juga memberikan fasilitasi sertifikasi halal reguler yang ditujukan bagi 50 pelaku UMKM dengan menggunakan dana alokasi khusus. Totok menjelaskan, sertifikasi halal reguler memerlukan serangkaian proses pemeriksaan produk, mulai dari bahan baku, proses pembuatan, hingga pemeriksaan laboratorium. Proses ini memerlukan biaya. Jika pelaku UMKM mengurus sendiri, biaya yang dikeluarkan Rp2,5 juta. Ini berbeda dengan sertifikasi halal *self declare* yang lebih sederhana. Biasanya, sertifikasi halal *self declare* menggandeng lembaga lain seperti Baznas atau Kemenag, sehingga bisa digelar secara gratis.

"Kalau *self declare* pesyaratannya ringan. Jadi, produk makanan nondaging, bahan baku, dan alatnya. Misalnya dari nabati, hanya pernyataan dari yang bersangkutan bahwa ini kita buat dari bahan ini. Cukup pernyataan saja kemudian memperoleh sertifikat," katanya.

Totok tak bisa memastikan berapa banyak UMKM di Kota Jogja yang sudah tersertifikasi halal. Saat ditanya persentase, Totok menuturkan sulit untuk dipantau. Sebab, usaha mikro kerap berganti usaha. Namun, melihat geliat dan antusiasmenya, dia optimistis mayoritas UMKM di Kota Jogja telah tersertifikasi halal.

"Label halal merupakan tuntutan, karena konsumen pastiuntutannya seperti itu. Harus ada label halal. Tidak sekadar label, tapi benar-benar sudah ada uji sertifikasi halal," katanya. (Aiff Anissa Karim/*)

Tri Karyadi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 Mei 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005